

RENSTRA

# **RANCANGAN AKHIR RENSTRA TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG**

*Jl. Pertanian No. Tlp (0766) Fax (0766) 8001002*

## KATA PENGANTAR

### ***Bismillahirrahmanirrahim.***

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dapat diselesaikan.

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen yang memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan secara lebih spesifik, Renstra memuat isu strategis khususnya dalam pembangunan infrastruktur dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2021-2026.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rancangan Awal Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing- masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bengkalis, 21 April 2022  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN  
BENGKALIS



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>9</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	12
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	12
2.2.2. Sarana dan Prasarana.....	17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan.....	22
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan.....	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
2.4.1. Tantangan.....	35
2.4.2. Peluang.....	36
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....</b>	<b>40</b>
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.....	40
3.2. Telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis.....	44
3.3. Telaah renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	

Riau.....	52
3.3.1 Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat .....	52
3.3.2 Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.....	54
3.4. Telaah RT/RW dan KLHS.....	55
3.5. Penentuan isu strategis.....	59
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>62</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>66</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>70</b>
6.1. Rencana program dan kegiatan.....	70
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>110</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>112</b>
8.1. Kesimpulan.....	112
8.2. Kaidah Pelaksanaan.....	113

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi ASN Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin.....	12
Tabel 2.2	Komposisi ASN Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan .....	13
Tabel 2.3	Komposisi ASN Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon .....	14
Tabel 2.4	Komposisi ASN Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan .....	14
Tabel 2.5	Komposisi ASN Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Menurut Usia.....	15
Tabel 2.6	Komposisi ASN Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Menurut Peta Jabatan .....	16
Tabel 2.7	Daftar Asset Yang Dimiliki Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.....	17
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis .....	24
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	25
Tabel 2.10	Target Dan Realisasi Belanja Tidak Langsung .....	27
Tabel 2.11	Target Dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020.....	28
Tabel 2.12	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020.....	29
Tabel 2.13	Analisa SWOT .....	37
Tabel 3.1	Rumusan Permasalahan Dan Akar Masalah Dalam Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.....	43
Tabel 3.2	Keterkaitan Antar Pokok-Pokok Visi Dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 .....	47

Tabel 3.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Dan Indikator RPJMD Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.....	50
Tabel 3.4	Komparasi Terhadap Telaah KLHS .....	56
Tabel 3.5	Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS .....	57
Tabel 4. 1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis 2021-2026.....	64
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 .....	67
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis 2021-2026.....	68
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.....	72
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis 2021-2026.....	111

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.....	11
Gambar 6.1	Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	70

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan taktis – strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Disamping itu rencana strategis memuat Visi dan Misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan berakhirnya masa perencanaan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing- masing bidang dalam lingkup Perangkat Daerah. Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala Daerah sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2007 dan PP Nomor 8 Tahun 2008 yang berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 ini tetap mengacu pada UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Oleh karenanya lima pendekatan perencanaan yang dipergunakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis adalah: (1) pendekatan politik, (2) pendekatan teknokratik, (3) pendekatan partisipatif, (4) pendekatan atas-bawah (*top-down*), dan (5) pendekatan bawah-atas (*bottom-up*). Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Visi Kabupaten Bengkalis 2021 – 2026, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bengkalis.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum utama untuk mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
9. Undang - Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
19. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan SPM;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
27. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

28. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 62);

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan jangka menengah (5 tahun) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta menjadi landasan kebijakan, sasaran, acuan, arahan, dan tuntunan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis sampai akhir periode perencanaan di tahun 2026.
2. Menggambarkan kondisi saat ini dan kecenderungan (*trend*) masa mendatang pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum di Kabupaten Bengkalis.
3. Menetapkan strategi, kebijakan, dan program, serta kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
4. Mensinkronkan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis serta Badan atau Dinas lain yang terkait baik tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Disamping itu Renstra Perangkat Daerah dapat dijadikan bahan evaluasi yang penting agar pembangunan berjalan secara

lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Bengkalis khususnya di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati, Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan, serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisi tentang Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Indikatif Pendanaan.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP.**

Bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan dari penyusunan Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah.

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan



Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

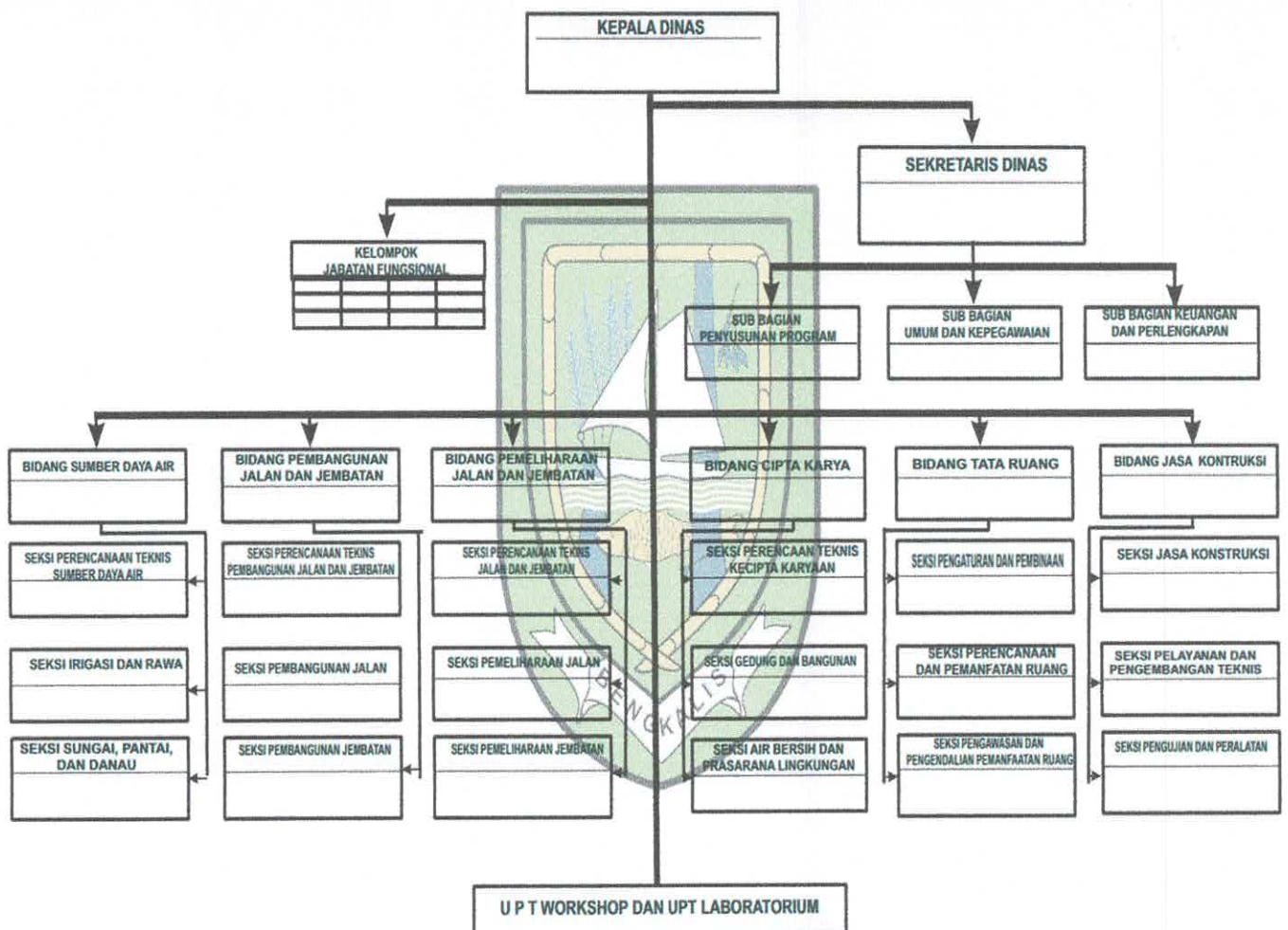
Sekretaris mempunyai subbagian yang terdiri dari

  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
3. Bidang Sumber daya Air, terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
  - b. Seksi Irigasi dan Rawa; dan
  - c. Seksi Sungai, Pantai dan Danau
4. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - b. Seksi Pembangunan Jalan; dan
  - c. Seksi Pembangunan Jembatan
5. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  - b. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
  - c. Seksi Pemeliharaan Jembatan.
6. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan Teknis keciptakarya; dan
  - b. Seksi Gedung dan Bangunan; dan
  - c. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.
7. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
  - b. Seksi Perencanaan dan Pemamfaatan Ruang; dan
  - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemamfaatan Ruang.
8. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari:
  - a. Seksi Jasa konstruksi;

- b. Seksi Pengembangan dan pelayanan Teknis; dan
- c. Seksi Pengujian dan Peralatan
- 9. Unit Pelaksana Teknis (UPTD)
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Gambar 2.1

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis**



**Sumber :** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sampai dengan Februari Tahun 2021 sebanyak 89 orang PNS, Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Komposisi ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin**

NO	Unit Kerja	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	Sekretariat	13	3	16
2.	Bidang Jasa Kontruksi	5	1	6
3.	Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	8	1	9
4.	Bidang Sumber Daya Air	8	3	11
5.	Bidang Cipta Karya	8	2	10
6.	Bidang Tata Ruang	7	2	9
7.	Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	11	0	11
8.	UPT Workshop	14	1	15
9.	UPT Laboratorium	2	0	2
<b>TOTAL</b>		<b>76</b>	<b>13</b>	<b>89</b>

**Sumber:** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah 89 orang ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Bengkalis, 76 orang (85,39%) adalah laki-laki dan 13 orang (14,61%) adalah perempuan. Komposisi ASN pada beberapa bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis masih belum merata.

**Tabel 2.2 Komposisi ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan**

No	UNIT KERJA	GOLONGAN				JML
		IV	III	II	I	
1.	Sekretariat	0	8	6	2	<b>16</b>
2.	Bidang Jasa Kontruksi	0	4	2	0	<b>6</b>
3.	Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	0	6	3	0	<b>9</b>
4.	Bidang Sumber Daya Air	0	7	4	0	<b>11</b>
5.	Bidang Cipta Karya	1	5	4	0	<b>10</b>
6.	Bidang Tata Ruang	1	7	1	0	<b>9</b>
7.	Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	4	7	0	<b>11</b>
8.	UPT Workshop	1	4	10	0	<b>15</b>
9.	UPT Laboratorium	0	2	0	0	<b>2</b>
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>89</b>

**Sumber:** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan II dan III, yaitu mencapai 84 orang atau 94,38%, sedangkan Golongan I dan IV hanya sejumlah 5 orang atau 5,62%.

**Tabel 2.3 Komposisi ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon**

No	UNIT KERJA	Eselon			JML
		IV	III	II	
1.	Sekretariat	3	1		4
2.	Bidang Jasa Kontruksi	3	1		4
3.	Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	3	1		4
4.	Bidang Sumber Daya Air	3	1		4
5.	Bidang Cipta Karya	3	1		4
6.	Bidang Tata Ruang	3	1		4
7.	Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3	1		4
8.	UPT Workshop	4			4
9.	UPT Laboratorium	1			1
<b>Total</b>		<b>26</b>	<b>10</b>		<b>33</b>

**Sumber:** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 33 jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis. Untuk eselon II diisi oleh eselon III untuk mengisi jabatan sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

**Tabel 2.4 Komposisi ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan Formal yang ditamatkan**

No	UNIT KERJA	PENDIDIKAN						JML
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Sekretariat	2	1	7	0	5	1	16
2.	Bidang Jasa Kontruksi	0	0	2	0	3	1	6
3.	Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	0	0	2	2	5	0	9
4.	Bidang Sumber Daya Air	0	0	3	4	3	1	11

5.	Bidang Cipta Karya	0	0	3	2	4	1	10
6.	Bidang Tata Ruang	0	0	2	1	5	1	9
7.	Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	0	8	1	2	0	11
8.	UPT Workshop	0	0	11	1	3	0	15
9.	UPT Laboratorium	0	0	0	0	2	0	2
Total		2	1	38	11	32	5	89

**Sumber:** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Sumber:** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ASN di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sebagian besar tingkat pendidikan SMA dan S1. SMA yaitu berjumlah 38 orang atau sebesar (42,70%) dan S1 yaitu sejumlah 32 orang atau sebesar (35,95%). Kemudian disusul pendidikan D3 sebanyak 11 orang atau sebesar (12,36%), pendidikan S2 yaitu sebanyak 5 orang atau sebesar (5,62%), pendidikan SD sebanyak 2 orang atau sebesar (2,25%) dan tingkat pendidikan SMP sebanyak 1 orang atau sebesar (1,12 %).

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tidak mengalami permasalahan dibidang pendidikan formal yang ditamatkan ASN nya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

**Tabel 2.5 Komposisi ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Menurut Usia**

No	Unit Kerja	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	Jml
1.	Sekretariat	0	0	2	3	2	5	4	16
2.	Bidang Jasa Kontruksi	0	0	0	2	1	2	1	6
3.	Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	0	0	3	2	4	0	0	9
4.	Bidang Sumber Daya Air	0	0	1	2	2	4	2	11

5.	Bidang Cipta Karya	0	0	2	4	2	0	2	10
6.	Bidang Tata Ruang	0	0	3	1	1	3	1	9
7.	Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	0	0	1	6	1	3	11
8.	UPT Workshop	0	0	0	5	5	2	3	15
9.	UPT Laboratorium	1	0	0	0	0	0	1	2
Total		1	0	11	20	23	17	17	89

**Sumber:** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis didominasi oleh usia muda dan produktif yang berumur 36-45 tahun yang berjumlah 43 orang atau (48,32 %). Sedangkan yang memasuki usia pensiun berjumlah 17 orang atau (19,10%).

**Tabel 2.6 Komposisi ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Menurut Peta Jabatan**

No	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	Eselon II	0	0	0
2	Eselon III	6	1	7
3	Eselon IV	25	1	26
4	Fungsional Tertentu (ahli dan terampil)	0	0	0
5	Fungsional Pelaksana	0	0	0
<b>Total</b>		<b>31</b>	<b>2</b>	<b>33</b>

**Sumber:** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 2 jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis. Dari 2 jabatan didominasi oleh jabatan Eselon IV sebanyak 26 orang atau (78,78%) dan sisanya jabatan eselon III sebanyak 7 orang atau (21,22%). Dari 2 peta jabatan tersebut, 93,95% didominasi oleh laki-laki dan sisanya 6,05% perempuan.

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

**Tabel 2.7 Daftar asset yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis**

No	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Status			Ket
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
	<b>ALAT BERAT</b>					
1	Grader + Attachment	1		1		
2	Exkavator	12		5	7	
3	Buldozer	11		5	6	
4	Crawler Excavator + Attachment	1		1		
5	excavator lainnya (dst)	2			2	
6	Dump Truck	4		4		
7	Tandam Roller	1		1		
8	Vibration Roller	12		6	6	
9	Tyre Roller	1		1		
10	Concrete Pump	1		1		
11	Concrete Mixer	2		2		
12	alat besar darat lainnya lainnya (dst)	1		1		
13	Air Compresor	1		1		
14	Portable Water Pump	1		1		
15	Mesin Bor Beton	6	3	3		
16	mesin bor lainnya (dst)	3	3			
	<b>KOMPUTER</b>					
17	P.C Unit	36	16	10	10	
18	Lap Top	44	20	20	2	
19	Lap Top	12	8	2	2	
20	Hard Disk	1	1			
21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	76	45	16	15	



22	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	3		
23	Router	3	3		
24	Modem	1	1		
25	Wireless Access Point	2	2		
26	Switch	1	1		
	<b>ALAT ANGKUTAN</b>				
27	Station Wagon	14	4	9	1
28	Pick Up	6	3	3	
29	Yeengler/Trailer	2	2		
30	Sepeda Motor	32	20	12	
31	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	16	10	6	
32	Gerobak Dorong	2	2		
	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>				
33	Mesin Gerinda	3	3		
34	Mesin Kompresor	2	2		
35	Mesin Las Listrik	1	1		
36	Mesin Pemotong Plat	1	1		
37	Mesin Bor Tangan	2	2		
38	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	1		
39	Dongkrak Hidrolik	1	1		
40	Tool Kit Box	1	1		
41	perkakas khusus (special tools) lainnya (dst)	2	2		
42	Bor	70	60	10	
43	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	4	4		
44	Rol Meter	1	1		
45	Automatic Distortion Meter	1	1		
46	Global Positioning System	5	5		
47	alat ukur universal lainnya (dst)	1	1		
48	alat ukur/test klinis lain lainnya (dst)	1	1		
49	Stopwatch	1	1		
50	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	21	21		
	<b>ALAT PERTANIAN</b>				
51	Alat Laboratorium lainnya	1	1		
52	Ragum /Catok	1	1		

	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>					
53	Mesin Fotocopy Folio	4	2	2		
54	Lemari Besi/Metal	2	2			
55	Lemari Kayu	5	5			
56	Rak Besi	54	50		4	
57	Filing Cabinet Besi	27	16	5	6	
58	Filing Cabinet Besi	3	3			
59	Filing Cabinet Besi	2	2			
60	CCTV - Camera Control Television System	27	20	7		
61	Papan Visual/Papan Nama	1	1			
62	Papan Visual/Papan Nama	8	8			
63	Overhead Projector	5	5			
64	Alat Kantor Lainnya	2	2			
65	Meja Rapat	5	5			
66	Meja 1/2 Biro	148	50	50	48	
67	Kursi Rapat	61	50	10	1	
68	Kursi Tamu	3	3			
69	Kursi Putar	4	4			
70	Kursi Biasa	10	10			
71	Bangku Tunggu	4	4			
72	Meja Komputer	2		2		
73	Sofa	9	8	1		
74	Meubeleur lainnya	26	20	6		
75	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	3			
76	Mesin Pemotong Rumput	9	3	6		
77	A.C. Window	52	22	10	20	
78	A.C. Split	112	50	50	12	
79	Kipas Angin	7	2		5	
80	Exhaust Fan	22	17	1	4	
81	Televisi	8	7	1		
82	Sound System	1	1			
83	Unit Power Supply (UPS)	5	1	1	3	
84	Camera Video	4	4			
85	Mimbar/Podium	2	2			
86	Karpas	5	5			
87	Alat Rumah Tangga Lain-lain	10	10			
88	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1			
89	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12	12			
90	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16	16			
91	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	2			
92	Meja Kerja Pejabat lain-lain	8		8		

93	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	1			
94	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	4	4			
95	Meja Tamu Biasa	4	4			
96	Meja Rapat Pejabat lainnya	2	2			
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	4			
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	18	14	2	2	
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	29	20	5	4	
100	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	22	10	6	6	
101	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	124	60	40	24	
102	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	6	6			
103	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	3			
104	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1			
105	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	2			
106	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	6	6			
107	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota	2	2			
108	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	31	23	8		
109	Buffet Kaca	29	20	8	1	
	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>					
110	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	1			
111	Telephone (PABX)	1		1		
112	Handy Talky (HT)	1	1			
113	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	1			
114	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	1			
115	Genset	2	2			
	<b>ALAT LABORATORIUM</b>					
116	Timbangan Elektronik	4	4			
117	Camera Photo Micrograph	1	1			
118	Slump Test Set	1	1			

119	Rig Uji Universal	1	1		
120	alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya (dst)	5	5		
121	Heavy Duty Solution Balance	1	1		
122	Alat Uji Tekan Hydrotastic	1	1		
123	Compressor Unit	1	1		
124	Manometer	10	10		
125	Alat Gerinda	1	1		
126	Core Bit	74	50	24	
127	Hydraulic Lab Press	1	1		
128	Abrasive Band Machines	1	1		
129	Hand Drill	1	1		
130	Alat Uji Keausan Pasir Jatuh	2	2		
131	Container N2 Cair (Alat Laboratorium Pertanian)	4	4		
132	Distiling Apparatus	1	1		
133	Penetrometer	4	4		
134	Vernier Calliper	1	1		
135	Sieve Shaker (Alat Laboratorium Oceanografi)	2	2		
136	Meja Kerja	24	20	4	
137	Generator Set (Lab Scale)	2	2		
138	alat peraga praktek sekolah bidang studi : matematika lainnya (dst)	2	2		
139	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	2	2		
140	Precision Bench Drilling Machine	1	1		
	<b>ALAT PERSENJATAAN</b>				
141	non senjata api lainnya (dst)	2	2		
<b>Total</b>		1568	996	379	193

**Sumber:** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021

Tabel di atas menjelaskan jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 1568 aset di lingkungan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis. Dari total tersebut, 996 aset dalam kondisi yang baik dengan persentase sebesar 63,53%. Adapun aset dengan kondisi rusak sedang sebanyak 379 atau sebesar 24,18%. Sedangkan aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 193 dengan persentase 12,29%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di Lingkungan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis ditahun berikutnya

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra Perangkat Daerah, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

#### **2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan**

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam Meningkatkan kualitas infrastruktur pekerjaan umum dan Meningkatkan kualitas tata ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Bengkalis kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan umum dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu, dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 pasal 54 ayat (3), besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Pengelolaan DAK Fisik Infrastruktur PUPR yang dikelola Kementerian PUPR meliputi 5 (lima) bidang, yaitu bidang Irigasi, bidang Jalan, bidang Air Minum, bidang Sanitasi dan bidang Perumahan. Terkait pengelolaan DAK Fisik Infrastruktur PUPR.

Capaian pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra SKPD Tahun 2016 – 2020 sebagai berikut ;

**Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra						Realisasi Capaian Tahunan Ke-						Rasio Capaian Pada Tahunan Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
1	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik.				48,9	52,33	55,69	59,06	62,43	49,22	52,60	46,39	47,50	48,63	100,65	100,52	83,30	80,43	77,90		
2	Persentase jembatan dalam kondisi baik				80,0	82,5	87,5	90,0	92,5	-	82,50	97,50	100	100	-	100,00	111,43	111,11	108,11		
3	Persentase Kecamatan remote area yang terkoneksi				-	-	-	86,0	88,0	-	-	-	100	100				116,28	113,64		
4	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik				-	-	-	78,0	79,0	-	70,15	-	90,00	90,00				115,38	113,92		
5	Persentase rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan				-	-	-	45,0	50,0	-	-	-	60,68	70,00				134,84	140,00		
6	Persentase kawasan perkotaan yang terlayani air bersih				-	-	-	22,5	25,0	-	-	-	38,23	38,58				169,91	154,32		
7	Persentase kawasan perdesaan yang terlayani air bersih				-	-	-	30,7	35,2	-	-	-	33,00	34,4				107,49	97,73		
8	Persentase luas kawasan bebas banjir				-	-	-	86,0	88,0	-	-	-	96,77	88,00				112,52	100,00		
9	Persentase luasan sawah yang terlayani irigasi				-	-	-	70,0	71,0	-	-	-	83,00	79,00				118,57	111,27		
10	Persentase IJJK yang diterbitkan				-	-	-	76,0	78,0	-	-	-	100	100				131,58	128,21		
11	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan tata ruang				-	39,0	41,0	43,0	45,0	-	39,50	-	39,05	43,00		101,28	-	90,81	95,56		

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu, Tahun 2021

**Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

N	Uraian Jenis Pelayanan/Urusan	Indikator	Satuan	Target SPM Tahun Ke-						Realisasi SPM Tahun Ke-						Rasio Capaian SPM pada Tahun Ke-												
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Pekerjaan Umum				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
1	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari (Kabupaten/kota)	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	100	100	100	100	100	17,23	17,08	16,97	16,81	19,28	19,28	17,23	17,08	16,97	16,81	19,28	19,28	17,23	17,08	16,97	16,81	19,28	19,28
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari																										
		Capaian Pelayanan SPALD-S Aman	SPM akses																									



Berdasarkan Tabel 2.8 dan 2.9 diatas, capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis rentang waktu 2016-2020 sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis fokus kepada pelayanan urusan wajib Terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja urusan wajib berdasarkan target pada RPJMD Kabupaten Bengkalis
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdapat 3 (Tiga) indikator pada urusan pekerjaan umum yang difokuskan pada pencapaian kinerja pelayanan pridesasi Renstra pada Tahun 2016-2021.

Tolak ukur pencapaian sasaran kinerja pelayanan dapat dilihat dengan membandingkan capaian kinerja (performance results) pada tahun berjalan dengan rencana kerja (performance plan) yang sudah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah sebelumnya (2016-2020). Dengan analisis capaian kinerja terhadap realisasi kinerja akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah kinerja (performa grip) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target-target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 dapat dicapai. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis selama periode sebelumnya telah berjalan optimal sehingga diharapkan pada tahun berikutnya dapat dilakukan upaya untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

### **2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan**

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi

anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik, pembayaran Gaji dan Tunjangan, serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sejumlah Rp.65.413.406.941,16 (Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Koma Satu Enam Rupiah). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp.57.393.522.655,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 87,74%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.10 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1.	2016	15.701.506.729,16	11.762.719.405,00	74,91
2.	2017	13.698.897.242,00	12.065.273.347,00	88,07
3.	2018	11.666.649.017,00	10.146.698.848,00	86,97
4.	2019	13.349.330.197,00	12.651.683.094,00	94,77
5.	2020	10.997.023.756,00	10.767.147.961,00	97,91
Jumlah		65.413.406.941,16	57.393.522.655,00	87,74

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik. Namun demikian, perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp. 8.019.884.286,16 (Delapan Milyar Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Delapan Puluh Enam Koma Satu Enam Rupiah).

b. Belanja Langsung (BL)

Belanja Langsung (BL) Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp. 2.986.628.556.812,91 (Dua Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Belas Koma Sembilan Satu Rupiah). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp.2.303.594.337.625,28 (Dua Triliun Tiga Ratus Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Koma Dua Delapan Rupiah) atau sebesar 77,13%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.11 Target dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1.	2016	869.914.633.558,92	491.160.617.010,00	56,44
2.	2017	849.178.209.592,00	636.214.403.106,00	74,91
3.	2018	403.215.807.694,00	374.368.117.208,00	92,84
4.	2019	589.168.266.218,99	564.105.055.870,00	95,71
5.	2020	275.151.639.749,00	237.746.144.431,28	86,32
	Jumlah	2.986.628.556.812,91	2.303.594.337.625,28	77,13

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik. Namun demikian, perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp.683.034.219.187,63 (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Koma Enam Tiga Rupiah).

**Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020**

No	Uraian Program	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2020	Anggaran	Realisasi
I	Belanja Tidak Langsung	15.701.50 6.729,16	13.698.89 7.242,00	11.666.64 9.017,00	13.349.33 0.197,00	10.997.02 3.756,00	11.762.719. 405,00	12.065.273. 347,00	10.146.69 8.848,00	12.651.6 83.094,0 0	10.767.14 7.961,00	74,91	88,07	86,97	94,77	97,91	97,91	-0,09	-0,02
II	Belanja Langsung	869.914.6 34.558,92	849.178.2 09.592,00	403.215.8 07.694,00	589.168.2 66.218,99	275.151.6 39.749,00	491.160.61 7.010,00	636.214.40 3.106,00	374.368.1 17.208,00	564.105. 055.870, 00	237.746.1 44.431,28	56,46	74,92	92,85	95,75	86,41	86,41	-0,25	-0,17
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.213.117. 040,00	4.491.597. 890,00	4.335.397. 520,00	6.024.066. 942,80	5.549.706. 800,00	5.144.700.7 98,00	4.035.683.1 48,00	3.435.590. 959,00	5.557.29 8.241,00	5.065.073. 267,00	82,80	89,85	79,25	92,25	91,27	91,27	-0,03	0,00
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	35.494.85 8.014,00	59.469.86 4.575,00	24.334.34 7.028,00	4.854.565. 731,00	58762900 0	18.705.911. 253,00	30.153.564. 396,00	24.321.73 9.708,00	4.778.43 6.521,00	546.752.0 28,00	52,70	50,70	99,95	98,43	93,04	93,04	-0,64	-0,59
3	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	374.070.0 00	311.923.8 00,00	100.000.0 00,00	250.000.0 00,00	264.000.0 00	201.822.40 0,00	306.028.10 0,00	71.260.15 0,00	179.591. 150,00	218.560.5 61,00	53,95	98,11	71,26	71,84	82,79	82,79	-0,08	0,02
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ke	91.430.80 0,00	1.021.479. 000,00	29.296.90 0,00	126.600.0 00,00	123.300.0 00	8.749.800,0 0	39.079.000, 00	29.261.30 0,00	125.638. 344,00	108.300.0 00,00	9,57	3,83	99,88	99,24	87,83	87,83	0,08	0,88
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	512.488.8 24.611,92	435.282.2 67.015,00	169.391.9 31.776,00	384.290.3 19.397,00	105.999.3 05.657	295.951.53 3.476,00	375.727.71 0.180,00	156.484.9 22.691,00	373.360. 910.314, 00	94.778.42 5.003,00	57,75	86,32	92,38	97,16	89,41	89,41	-0,09	-0,02

No	Uraian Program	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2019
6	Program pembangunan saluran drainase/go rong-gorong	29.885.67 7.022,00	68.678.43 3.883,00	33.203.92 0.878,00	6.043.213. 065,00	6.484.008. 863	9.599.016.9 22	39.499.522. 595,00	32.337.27 6.679,00	5.039.19 4.901,00	6.178.855. 273,00	32,12	57,51	97,39	83,39	95,29	-0,33	-0,25
7	Program pembangunan turap/talud /bronjong	155.555.9 73.901,00	89.948.27 2.494,00	27.400.95 4.240,00	1.284.516. 626,00	4.170.676. 000	97.222.598. 816,00	66.989.710. 404,00	25.490.86 4.364,00	1.168.52 7.276,00	2.488.475. 512,00	62,50	74,48	93,03	90,97	59,67	-0,32	-0,10
8	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	77.216.95 8.408,00	47.252.72 8.178,00	22.828.42 0.406,00	49.160.58 2.200,00	55.238.10 9.261	46.315.434. 028,00	33.957.115. 662,00	22.774.85 4.326,00	48.544.3 15.295,0 0	55.048.70 0.625,00	59,98	71,86	99,77	98,75	99,66	-0,60	-0,60
9	Program rehabilitasi /pemeliharaan talud/bronjong	1.087.351. 668,00	4.981.448. 668,00	1.702.779. 000,00	994.400.0 00,00	1.187.200. 000	64.236.668, 00	2.868.832.8 68,00	1.702.779. 000,00	965.514. 430,00	1.173.415. 320,00	5,91	57,59	100,0 0	97,10	98,84	-0,08	0,04
10	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	66.650.71 7,00	919.957.8 00,00	1.310.754. 100,00	469.195.0 00,00		9.894.717,0 0	103.002.80 0,00	892.699.1 00,00	210.991. 000,00		14,85	11,20	68,11	44,97		0,02	1,07
11	Program Pembangunan sistem informasi/d ata base jalan dan jembatan	796.666.5 17,00	950.426.3 00,00	877.855.0 00,00			721.966.80 0,00	51.401.000, 00	877.855.0 00,00			90,62	5,41	100,0 0				
12	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	4.368.624. 000,00	3.709.294. 000,00	1.991.193. 300,00	3.166.550. 600,00	2.487.213. 000	2.302.051.9 50,00	3.665.989.7 48,00	1.959.256. 300,00	2.937.59 1.750,00	2.410.965. 792,00	52,70	98,83	98,40	92,77	96,93	-1,00	-1,00

No	Uraian Program	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2019
13	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya	4.489.996.636,00	9.339.554.308,00	4.814.991.000,00	1.571.948.100,00	2.296.736.000	1.334.527.886,00	7.613.151.245,00	4.164.849.441,00	1.560.253.478,00	2.127.649.675,28	29,72	81,52	86,50	99,26	92,64	-0,13	0,01
14	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	11.222.681.738,00	46.952.841.938,00	59.501.182.107,00	46.826.315.692,00	35.247.169.000	3.228.142.768,00	35.532.107.103,00	56.201.339.597,00	39.269.188.151,35	26.693.886.785,00	28,76	75,68	94,45	83,86	75,73	-0,15	0,12
15	Program Pengembangan dan Pengelolaan 'dan Konservasi Sungai' Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	895.751.668,00	2.598.403.187,00	1.466.690.200,00	518.974.000,00	154.927.400	387.201.668,00	1.048.454.987,00	1.466.690.200,00	510.430.000,00	29.949.115,00	43,23	40,35	100,00	98,35	19,33	0,33	0,70
16	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		3.488.580.200,00	3.531.187.864,00	3.169.507.164,00	3.403.214.000		1.273.229.482,00	3.130.801.936,00	2.069.064.646,00	3.101.773.379,00		36,50	88,66	65,28	91,14	-0,36	-0,47
17	Program pengendalian banjir	11.669.667.344,00	68.848.952.356,00	31.686.770.475,00	20.944.448.639,19	2.955.330.318	1.154.961.344,00	33.225.491.888,00	29.586.058.642,00	20.138.231.118,60	2.770.112.525,00	9,90	48,26	93,37	96,15	93,73		
18	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	5.416.907.158,00					3.475.682.058,00					64,16					-0,29	0,24

No	Uraian Program	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	anggaran	realisasi
19	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	283.753.958,00					103.408.800,00				36,44					-1,00	-1,00	
20	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	6.076.686.500,00					281.340.500,00				4,63					-1,00	-1,00	
21	Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1.048.713.100,00					25.193.100,00				2,40					-1,00	-1,00	
22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	5.170.273.758,00					4.922.241.258,00				95,20					-1,00	-1,00	
23	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah			13.602.292.700,00	57.847.549.362,00	46.391.921.950		8.605.413.615,00	56.361.571.729,05	32.820.958.347,00		63,26	97,43	70,75	-1,00	-1,00		
24	Program Pembinaan Jasa Konstruksi				635.665.600,00	220.500.000			424.741.329,00	216.022.065,00			66,82	97,97				
25	Program Perencanaan Tata Ruang		164.954.000,00	500.843.200,00	599.015.200,00	1.895.567.500		20.457.000,00	514.304.500,00	1.545.457.159,00	12,40	45,84	85,86	81,53				
26	Program Pemanfaatan Ruang																	

No	Uraian Program	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata - rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	anggaran	realisasi
27	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		767.230.000,00	605.000.000,00	390.832.900,00	495.125.000,00		103.871.500,00	605.000.000,00	389.261.696,00	422.812.000,00		13,54	100,00	99,60	85,40		



Tabel di atas memberikan data terkait dengan program, pagu anggaran dan realisasinya pada periode 2016-2020. Beberapa catatan atas informasi kinerja anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis antara lain adalah:

1. Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2016 sampai tahun 2020 pada belanja tidak langsung sebesar -0,09% dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar -0,02%, sedangkan untuk anggaran belanja langsung rata-rata pertumbuhannya sebesar -0,25% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -0,17%.
2. Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan dalam kondisi baik yaitu pada tahun 2018. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran dalam kondisi kurang baik pada tahun 2016. Pada tahun 2016 terlihat jelas gap antara realisasi dan anggaran, dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada tahun tersebut.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran pelayanan, *outcome* program, maupun *output* kegiatan, serta berupaya memperbaiki kembali metode penyusunan perencanaan anggaran.

#### **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah daerah, dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global tersebut, telah sejalan dengan Visi Kabupaten Bengkalis yaitu untuk sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia. Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan terus meningkatkan

ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing dalam konteks global dapat membaik.

Pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur kebinamargaan dan pengairan dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif.

Pembangunan Infrastruktur dapat dijadikan sarana untuk mencapai tujuan antara lain: peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan yang secara keseluruhan. Dengan perwujudan melalui pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan dalam mendukung distribusi lalu-lintas barang, jasa dan manusia maupun pembentukan struktur gedung serta membuka kawasan terpencil.

Adapun Tantangan dan Peluang yang mempengaruhi peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut :

#### **2.4.1. Tantangan**

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

- 1) Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan;
- 2) meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing dalam konteks global dapat membaik;
- 3) Metode struktur yang sesuai dengan daya dukung tanah Bengkalis;

- 4) Perubahan iklim yang tidak menentu, menyulitkan kegiatan dilapangan menyebabkan rendahnya kualitas pekerjaan;
- 5) Adanya interfensi kepentingan;
- 6) Belum adanya pembinaan jasa konstruksi yang efektif;
- 7) Minimnya sumber air bersih;
- 8) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB.

#### **2.4.2 Peluang**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam suatu pelaksanaan tugas;
- 2) Adanya keterbukaan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan melalui proses musrenbang maupun proposal yang masuk ke dinas
- 3) Tersedianya RTRW dan KLHS;
- 4) Tersedianya instansi diklat teknis dan perguruan tinggi;
- 5) Pemanfaatan teknologi daring dalam berkomunikasi jarak jauh;
- 6) Adanya penanganan secara langsung pada infrastruktur yang mengalami kerusakan yang mendesak (swakelola).

Analisis SWOT dapat digunakan dalam penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal yaitu kekuatan dan kelemahan, sedangkan unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman.

Berdasarkan analisa SWOT, maka dapat kita tentukan alternatif strategi yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis antara lain:

**Tabel 2.13 Analisa SWOT**

<p><b>Faktor Eksternal</b></p>	<p><b>Peluang (O) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam suatu pelaksanaan tugas;</li> <li>2. Adanya keterbukaan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan melalui proses musrenbang maupun proposal yang masuk ke dinas</li> <li>3. Tersedianya RTRW dan KLHS;</li> <li>4. Tersedianya instansi diklat teknis dan perguruan tinggi;</li> <li>5. Pemanfaatan teknologi daring dalam berkomunikasi jarak jauh.</li> </ol>	<p><b>Tantangan (T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan;</li> <li>2. meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing dalam konteks global dapat membaik</li> <li>3. Metode struktur yang sesuai dengan daya dukung tanah Bengkalis;</li> <li>4. Perubahan iklim yang tidak menentu, menyulitkan kegiatan dilapangan menyebabkan rendahnya kualitas pekerjaan.</li> </ol>
<p><b>Faktor Internal</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Adanya penanganan secara langsung pada infrastruktur yang mengalami kerusakan yang mendesak (swakelola)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Adanya interfensi kepentingan Urusan</li> <li>6. Belum adanya pembinaan jasa konstruksi yang efektif</li> <li>7. Minimnya sumber air bersih</li> <li>8. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB</li> </ol>

<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Alternatif Strategi (S-O):</b>	<b>Alternatif Strategi (S-T):</b>
<p>1. Adanya sumber daya aparatur profesional;</p> <p>2. Adanya dana yang alokasikan untuk mendukung kegiatan;</p> <p>3. Adanya UPT yang mendukung visi organisasi (UPT Workshop dan UPT Laboratorium</p> <p>4. Tersedianya peralatan penunjang kerja</p> <p>5. Sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</p>	<p>1. Tingkatkan kinerja UPT untuk menangkap kebutuhan masyarakat akan pembangunan infrastruktur;</p> <p>2. Tingkatkan kemampuan aparatur melalui kerja sama dengan institusi diklat teknis dan perguruan tinggi;</p> <p>3. Memberikan diklat SDM sesuai fungsi dan tugas personil;</p> <p>4. Memanfaatkan teknologi daring semaksimal mungkin dengan peralatan penunjang kerja yang tersedia.</p>	<p>1. Manfaatkan UPT untuk bekerja sama dengan penyedia jasa dalam mengantisipasi kinerja penyedia jasa yang kurang memadai</p> <p>2. Manfaatkan renstra dinas dan komitmen pemerintah kabupaten untuk mengatasi masalah infrastruktur jalan, jembatan, gedung, drainase, dan irigasi yang belum memadai;</p> <p>3. Manfaatkan motivasi beajar aparatur untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan agar hasil pembangunan baik;</p> <p>4. Menerapkan tupoksi sesuai urusan wajib ke PUPR-an sesuai permendagri 90;</p> <p>5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memanfaatkan IT</p> <p>6. Mengoptimalkan atau jika diperlukan, mencari alternatif sumber air bersih baru</p>

<b>Kelemahan (W):</b>	<b>Alternatif Strategi (W-O)</b>	<b>Alternatif Strategi (W-T):</b>
1. Terbatasnya ketersediaan anggaran daerah;	1. Tingkatkan jumlah personil pejabat pelaksana teknik	1. Memanfaatkan anggaran sesuai kebutuhan infrastruktur pembangunan;
2. Jumlah dan tingkat pendidikan pegawai yang tidak merata ditiap-tiap bagian;	1. Kegiatan yang memenuhi kriteria dengan cara memanfaatkan diklat provinsi;	2. Penambahan SDM yang merata
3. Masih banyaknya kondisi infrastruktur yang belum mantap	2. Memanfaatkan teknologi IT dalam melengkapi database	3. Peningkatan SDM yang sesuai dengan tuntutan kerja
4. Terbatasnya sarana dan prasarana Kuantitas dan kualitas pegawai kurang	3. Optimalisasi kinerja UPT Workshop dengan cara peningkatan/perekrutan SDM terampil, perbaikan/pengadaan peralatan dan upaya sertifikasi	4. Mengoptimalkan SOP untuk mendukung peningkatan kesadaran masyarakat
5. Belum lengkapnya database teknis di setiap bidang	4. Pembinaan terhadap rekanan dengan cara kerjasama dengan diklat SDM menggunakan metode daring	
6. SOP lemah		

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang telah dicapai dengan yang direncanakan serta antara “apa” yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pemetaan permasalahan di setiap bidang kerja yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis. Berikut identifikasi permasalahan di setiap bidang kerja :

**a. Sekretariat**

Identifikasi permasalahan pada sekretariat sbb :

- ❖ Belum optimalnya data dan informasi Dinas PUPR yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- ❖ Belum optimalnya sistem pelaporan administrasi dan pelaporan inventaris barang;
- ❖ Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupten Bengkalis belum optimal.

**b. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Identifikasi permasalahan pada bidang pembangunan jalan dan jembatan sbb :

- ❖ Masih ada jalan poros dan jembatan yang belum terbangun
- ❖ Peningkatan transportasi arus barang, orang dan jasa;
- ❖ Daya dukung tanah yang rendah
- ❖ Database jalan belum lengkap

**c. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

Identifikasi permasalahan pada bidang pemeliharaan jalan dan jembatan sbb :

- ❖ Kondisi jalan poros dan jembatan masih ada yang rusak, baik itu rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat.
- ❖ Masih seringnya terjadi pelanggaran terhadap beban muatan sehingga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan

**d. Bidang Cipta Karya**

Identifikasi permasalahan pada bidang cipta karya sbb :

- ❖ Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum layak masih sangat rendah
- ❖ Infrastruktur sistem penyediaan air minum rendah



- ❖ Belum adanya database bangunan gedung dan SPAM
- ❖ Masih adanya bangunan gedung pemerintah yang belum difungsikan/belum selesai

**e. Bidang Sumber daya Air**

Identifikasi permasalahan pada bidang sumber daya air sbb :

- ❖ Belum adanya database banjir yang terupdate sebagai dasar target kinerja.
- ❖ Banyaknya saluran dan sungai yang butuh dipelihara dan dilakukan rehabilitasi
- ❖ Sebagian besar sistem jaringan irigasi rawa yang ada masih konvensional dan belum memiliki sumber air selain tadah hujan.
- ❖ masih banyak pemukiman dan daerah lahan pertanian pangan seperti daerah irigasi yang terdampak abrasi
- ❖ Lajunya tingkat abrasi pantai
- ❖ Masih ada daerah yang rawan longsor
- ❖ Infrastruktur Air Baku yang ada belum mampu untuk melayani kebutuhan Air Bersih
- ❖ Infrastruktur air bersih masih belum merata

**f. Bidang Tata Ruang**

Identifikasi permasalahan pada bidang tata ruang sbb :

- ❖ belum disahkannya Perda RTRW sehingga perencanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan tidak optimal
- ❖ Proses pemberian rekomendasi IMB, informasi/kesesuaian pola ruang masih memerlukan waktu yang lama
- ❖ Belum optimalnya sistem informasi penataan ruang

**g. Bidang Jasa Konstruksi**

- ❖ Kurangnya Fasilitasi perangkat pendukung dalam penerbitan izin dan Rekomendasi teknis SIPJAKI

- ❖ Belum berfungsinya laboratorium teknik
- ❖ Belum semua kecamatan memiliki workshop PUPR

**Tabel 3.1 Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Dalam Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Akar Masalah</b>
Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang belum merata	Jalan dan jembatan dalam kondisi baik belum merata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin dan berkala tidak dilakukan pada seluruh ruas karena keterbatasan anggaran.</li> <li>• Tonase kendaraan yang melewati ruas jalan melebihi batas maksimal kekuatan jalan.</li> <li>• Daya dukung tanah yang rendah</li> </ul>
Infrastruktur sistem penyediaan air minum rendah	Sumber air melalui perpipaan masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Air Baku yang Belum Memadai</li> <li>• Kapasitas Pengolahan Air yang Kurang</li> <li>• Jaringan perpipaan yang sudah lama sehingga tidak mendukung tekanan air dari pendistribusian</li> <li>• Jaringan distribusi pelanggan masih minim</li> <li>• SPAM permukiman belum dapat memenuhi kebutuhan air minum karena kapasitas produksi yang rendah.</li> </ul>
Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Jaringan Irigasi	Kondisi jaringan irigasi yang kurang baik belum dapat melayani secara maksimal kebutuhan air pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian besar sumber air belum dapat digunakan secara optimal</li> <li>• Sistem jaringan irigasi masih tradisional</li> <li>• Daerah irigasi terpengaruh oleh pasang surut</li> </ul>

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Akar Masalah</b>
Kerentanan resiko genangan banjir	Menurunnya daya tampung sungai dan sistem drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran pembuangan air tidak dapat berfungsi secara maksimal</li> <li>• Saluran pembuangan air tidak dapat berfungsi secara maksimal</li> <li>• Masih kurangnya sistem jaringan drainase yang memadai</li> </ul>
Kerentanan resiko abrasi pantai	Tingginya tingkat abrasi di wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rentannya kondisi tanah di daerah pesisir pantai yang terdampak abrasi</li> <li>• Panjangnya daerah yang berada di pesisir pantai yang terdampak abrasi</li> </ul>
Masih rendahnya ketersediaan air baku	Infrastruktur Air Baku yang ada belum memadai untuk melayani kebutuhan Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya Infrastruktur Air Baku yang merata</li> <li>• Sulitnya untuk mendapatkan sumber air baku</li> </ul>
Masih adanya bangunan gedung pemerintah belum berfungsi secara optimal	Perencanaan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pemerintah Belum Tertib dan Efesien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum lengkapnya sarana gedung di beberapa kantor instansi pemerintahan</li> <li>• Masih adanya bangunan gedung kantor yang belum difungsikan/belum selesai</li> </ul>

### **3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKALIS.**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, yaitu “Terwujudnya

Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”.Penjelasan Visi Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Bermakna: Suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan. Maju, Bermakna: Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Semua Kebutuhan Baik Pangan, Sandang, Papan, Pendidikan, Kesehatan dan Pemanfaatan Teknologi, ditandai dengan Tingginya Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Manusia yang Kompetitif serta Masyarakat yang lebih Mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa. Sejahtera, Bermakna: Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Kebutuhan Dasar sebagai Wujud dari Pembangunan yang Adil dan Merata dan menyentuh semua Aspek Kehidupan yang ditandai dengan Tingkat Pendapatan yang Cukup, Rendahnya Angka Kemiskinan, Rendahnya Tingkat Kriminal serta Tingkat Kesehatan dan Pendidikan yang sangat baik.

Misi merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang dinyatakan secara tegas dan jelas sebagai manifestasi dari keinginan masyarakat demi kemajuan daerah.

Atas dasar itu misi Tahun 2021 – 2026 dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, maka yang menjadi penekanan pada Misi ke-3 yakni ” Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat” dengan tujuan Meningkatkan Aksesibilitas Infrastruktur antar daerah dan antar wilayah, Mengoptimalkan Potensi Kabupaten Bengkalis Sebagai Daerah Perbatasan Demi Tercapainya Masyarakat Yang Sejahtera sedangkan sasarannya adalah tersedianya aksesibilitas infrastruktur antar kawasan, antar daerah dan antar wilayah, tersedianya infrastruktur yang berkualitas, tersedianya layanan air bersih yang memadai, terwujudnya sinergi pembangunan antar kawasan, antar daerah dan antar pemerintah dengan memanfaatkan potensi kawasan perbatasan.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis yaitu:

**Tabel 3.2 Keterkaitan antar pokok-pokok visi dan misi RPJMD  
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah kebijakan
<b>VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA</b>				
<b>Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter</b>				
2.1. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik.	2.1.1. Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan	2.1.1.1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah.	2.1.1.1.1. Penguatan akselerasi pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.	2.1.1.1.1.1. Sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.
		2.1.1.2. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).	2.1.1.1.2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan.	2.1.1.1.2.1. Melaksanakan sinergisitas pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan.
		2.1.1.3. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE).	2.1.1.1.5. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan pemerintahan.	2.1.1.1.5.1. Menyediakan Kebijakan, Tatakelola dan Mengembangkan Layanan Teknologi Informasi dan komunikasi yang terintegrasi.
<b>Misi 3: Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat</b>				
3.1. Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah.	3.1.1. Tersedianya infrastruktur jalan wilayah dalam kondisi baik.	3.1.1.1. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik.	3.1.1.1.1. Penguatan kualitas jaringan jalan dan jembatan antar kawasan dan antar wilayah.	3.1.1.1.1.1. Fasilitas peningkatan kualitas jalan (jembatan) strategis pada kluster kawasan yang bersumber dari anggaran non APBD.
		3.1.1.2. Panjang Jalan Poros dan Jembatan Pada Wilayah Perbatasan Dalam Kondisi Baik.		3.1.1.1.1.2. Mengembangkan jaringan jalan poros, jembatan dan penataan drainase pada wilayah kecamatan dan perdesaan

			3.1.1.1.2. Penguatan jaringan infrastruktur jalan dan jembatan pada wilayah perbatasan	3.1.1.1.2.1. Mengupayakan pemerataan penyediaan serta fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan pada wilayah LOKPRI (perbatasan)
	3.1.3. Tersedianya layanan infrastruktur pemukiman yang sehat dan aman.	3.1.3.2. Persentase Rumah Tangga (RT) akses air bersih.	3.1.3.1.2. Penguatan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat.	3.1.3.1.2.1. Optimalisasi dan perluasan cakupan pelayanan penyediaan air bersih bagi rumah tangga
3.2. Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan.	3.2.2. Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup.	3.2.2. Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup.	3.2.2.1.1. Penguatan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan.	3.2.2.1.1.2. Memfungsikan dengan baik Pemanfaatan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang.

Hal ini sejalan dengan strategi arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis yakni:

**Tujuan :**

1. Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah
2. Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan

**Sasaran :**

1. Tersedianya aksesibilitas infrastruktur antar kawasan, antar daerah dan antar wilayah.
2. tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas
3. Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup

**Strategis :**

1. Peningkatan pengumpulan data dan informasi Dinas PUPR yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan yang baik;
3. Peningkatan sistem jaringan irigasi;
4. Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
5. Peningkatan infrastruktur pelindung pantai dan tebing;

6. Peningkatan infrastruktur air baku;
7. Peningkatan laporan SIPJAKI;
8. Peningkatan sistem penyediaan air minum;
9. Peningkatan bangunan gedung yang layak;
10. Peningkatan peraturan daerah/peraturan Kepala Daerah tentang rencana tata ruang.

**Arah Kebijakan:**

1. Peningkatan pengumpulan data dan informasi Dinas PUPR yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan yang baik;
3. Terlaksananya sistem jaringan irigasi;
4. Terlaksananya infrastruktur pengendalian banjir;
5. Terlaksananya infrastruktur pelindung pantai dan tebing;
6. Terlaksananya infrastruktur air baku;
7. Terlaksananya laporan SIPJAKI;
8. Terlaksananya sistem penyediaan air minum;
9. Terlaksananya bangunan gedung yang layak;
10. Terlaksananya peraturan daerah/peraturan Kepala Daerah tentang rencana tata ruang.



**Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis**

Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Visi RPJMD : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera.										
Misi II : Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter										
2.1	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	50	53	56	59	63	67	72	72
	2.1.1 Meningkatkan kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	B	BB	BB	BB	A	A	A	A
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	85	86	87	90	95	95	95
		Indek Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE)	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	2,8	2,8

Misi III : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat										
3.1	Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah	Rasio konektivitas Kabupaten	90	91	93	94	95	96	97	97
3.1.1	Tersedianya infrastruktur jalan wilayah dalam kondisi baik	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	52,53%	53,50%	55,49%	57,47%	59,46%	61,44%	63,43%	63,43%
		Panjang Jalan Poros dan Jembatan Pada Wilayah Perbatasan Dalam Kondisi Baik	n/a	11.041 Km	16.562 Km	22.083 Km	27.604 Km	33.125 Km	38.646 Km	38.646 Km
3.1.3	Tersedianya layanan infrastruktur pemukiman yang sehat dan aman	Persentase RT akses air bersih	35,20 %	58,03 %	60,53 %	63,03 %	65,53 %	68,03 %	70,53 %	70,53%
		Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,67	70,7	70,85	71	71,14	71,29	71,44
3.2	Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,73	56	56,06	56,11	56,17	56,22	67	67
3.2.2	Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,73	56	56,06	56,11	56,17	56,22	67	67

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

### **3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU.**

Telaahan Kesesuaian terhadap Rencana Strategis antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis antara lain :

#### **3.3.1 Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan

permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sedangkan arah kebijakan RPJMN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah “meningkatkan penyediaan infrastruktur permukiman yang disertai dengan pengembangan system pengelolaan dan pemanfaatan yang partisipatif dan berkelanjutan” dengan strategi :

- Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak dan aman
- Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum
- Pengembangan dan pengelolaan SPAM

Untuk peningkatan kualitas dan pencapaian indikator sasaran telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 29/prt/m/2018 tanggal 27 desember 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dengan indikator ;

- Persentase Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari (Kabupaten/kota);
- Persentase Penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar;
- Persentase Penyediaan pelayanan SPALD-S akses Aman.

### **3.3.2 Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.**

Visi Gubernur dan wakil Gubernur Riau menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan wakil Gubernur Riau ini menjadi visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 yaitu : **“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”**.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan untuk mencapai visi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 -2024 adalah :

- Misi 1** Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya Saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya;
- Misi 2** Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing;
- Misi 3** Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang prima berbasis teknologi informasi;
- Misi 4** Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- Misi 5** Mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan Pariwisata berdaya saing.

Misi Gubernur dan wakil Gubernur Riau yang terkait langsung dengan Dinas Pekerjaan Uum dan Penataan Ruang adalah misi keempat yaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan kebijakan yaitu :

1. Fungsionalisasi dan Optimalisasi RTRW dan RDTR Kabupaten Bengkalis.
2. Penyediaan database infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan.
3. Penyiapan, penataan dan pengembangan kawasan khusus seperti kawasan industri, kawasan ekonomi dan kawasan potensial lainnya.
4. Penguatan infrastruktur pedesaan. Pembangunan dan penguatan infrastruktur antar kawasan, antar kecamatan dan antar desa.
5. Penanganan abrasi, sungai dan pantai secara berkelanjutan.
6. Optimalisasi pelayanan penyediaan air bersih.
7. Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) Perbatasan negara.

#### **3.4 TELAAH RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

Pembangunan dan lingkungan hidup merupakan dua sisi yang saling berkaitan. Pelaksanaan pembangunan dirasakan perlu untuk meningkatkan harkat hidup manusia, namun di lain pihak tidak jarang kebijakan, rencana, program dan proyek pembangunan tanpa disadari mengakibatkan degradasi dan kerusakan lingkungan. Pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan lebih efektif tercapai apabila

pelaksanaannya dilakukan sejak proses perumusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah suatu penilaian mandiri (self assessment) untuk menelaah sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; serta kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Langkah-langkah telaah KLHS yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan sebagaimana tabel 3.3 dan tabel 3.4:

**Tabel 3.4 Komparasi Terhadap Telaah KLHS**

No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi DPUPR Kab. Bengkalis	Permasalahan Pelayanan DPUPR	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Analisis daya dukung (terutama ketersediaan air tanah) tidak mencukupi	Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang (RDTR dan PZ belum ada dan belum diPerdakan) sehingga sulit untuk mengontrol pemanfaatan ruang	Proses legalisasi RDTR dan PZ cenderung lama  Keterbatasan kapasitas SDM untuk melakukan analisis daya dukung	Perda RTRW sebagai payung hukum pengendalian pemanfaatan ruang walaupun belum ada

2	Degradasi wilayah pesisir	Tingginya tingkat abrasi pantai (karena jenis tanah sangat berpengaruh terhadap gerakan air pasang)	Tingginya arus gelombang (Kecepatan abrasi pantai tergantung kepada besarnya energi gelombang air laut terhadap pantai)	Komitmen untuk merehabilitasi kawasan pantai
3	Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim (peningkatan intensitas hujan)	Jaringan drainase di Kabupaten Bengkalis belum dirancang untuk menghadapi kerentanan terhadap perubahan iklim	Analisis tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim belum dilakukan karena keterbatasan SDM, data, dan teknologi	Analisis tingkat kerawanan bencana telah mulai dilakukan

**Tabel 3.5 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS**

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS Kab. Bengkalis	Implikasi Terhadap Pelayanan DPUPR Kab. Bengkalis	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan DPUPR Kab. Bengkalis
Rekomendasi alih fungsi lahan kawasan peruntukan budidaya menjadi Kawasan peruntukan lindung dapat dilaksanakan bertahap dalam rentang 20 tahun, sehingga minimal pada tahun 2040 kondisi sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Bengkalis dapat lebih baik dengan indikasi kuantitatif luasan lahan peruntukan lindung atau konservasi menjadi 25,4% dari luasan keseluruhan	kawasan hutan, perkebunan, dan pertambangan - migas berupa usulan kepada pemerintah pusat untuk dikonversi (alih fungsi lahan) menjadi kawasan hutan konservasi minimal 2.757 ha,	Alih fungsi lahan tidak boleh mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Alokasi ruang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung
Restorasi Kawasan peruntukan budidaya yang terindikasi memiliki lahan gambut yang telah terdegradasi dengan upaya yang dilakukan BRG mencakup 3 hal yaitu rewetting	Melakukan pengawasan pada Kawasan perkebunan yang terindikasi berada pada lahan gambut dalam (Kawasan yang direkomendasikan menjadi Kawasan	Apabila telah terjadi aktivitas perkebunan, maka pengelolaan perkebunan harus memperhatikan Teknik perkebunan di lahan basah gambut, memperhatikan tinggi muka air tanah, tidak	Menggunakan cara rewetting dan revegetasi sebagai Upaya merestorasi kawasan hutan dan perkebunan di lahan gambut.



(pembasahan kembali lahan gambut), revegetasi (penanaman kembali areal yang terbakar) dan revitalisasi mata pencaharian masyarakat	hutan lindung gambut) seluas 6.440,9 ha	membuat kanal seperti pada Kawasan perkebunan non gambut	
Mengembangkan spesies tanaman perkebunan alternatif yang tahan terhadap level muka air yang lebih tinggi	spesies pohon akasia yang toleran terhadap level muka air yang tinggi dan masih tetap memproduksi kayu yang sesuai untuk produksi bubur kertas. Meskipun demikian, mendukung para petani kecil yang sering kali tidak memiliki metode lain selain membakar untuk membersihkan lahan agar siap ditanami.	Rekomendasi alih fungsi lahan kawasan peruntukan budidaya menjadi Kawasan peruntukan lindung dapat dilaksanakan bertahap dalam rentang 20 tahun, sehingga minimal pada tahun 2040 kondisi sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Bengkalis dapat lebih baik dengan indikasi kuantitatif luasan lahan peruntukan lindung atau konservasi menjadi 25,4% dari luasan keseluruhan.	Mengeluarkan Kawasan perkebunan dari indikasi rekomendasi kawasan sempadan sungai
Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten Bengkalis apabila belum disusun dan dilegalkan sebagai peraturan daerah, dapat mengacu pada KLHS RTRW	RPPLH kabupaten Bengkalis apabila belum disusun dan dilegalkan sebagai peraturan daerah, dapat mengacu pada alternatif rekomendasi penambahan kawasan peruntukan lindung pada KLHS RTRW Kabupaten Bengkalis 2020 – 2040.	RPPLH dipergunakan sebagai Dasar penyusunan RPJP dan RPJM suatu daerah untuk pemanfaatan sumber daya alam	Pernyataan dalam UU No 32 Tahun 2009, pada Pasal 10. Namun apabila suatu daerah belum memiliki RPPLH Berdasarkan penjelasan UU No 32 Tahun 2009, pada Pasal 12 ayat (2) maka DDDTLH dapat digunakan dalam penyusunan RPJP dan RPJM tersebut

### **3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS.**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Pengoptimalan data dan informasi Dinas PUPR yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis masih kurang data dan informasi Dinas PUPR yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menyikapi isu ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis mesti bisa meningkatkan kualitas penyusunan data dan informasi.
2. Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan yang baik  
Masih ada jalan poros dan jembatan yang belum terbangun, Kondisi jalan poros dan jembatan masih ada yang rusak, baik itu rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat. Untuk pembangunan jalan dan jembatan yang baik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis melaksanakan perencanaan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.
3. Pembangunan sistem jaringan irigasi  
Kondisi jaringan irigasi yang kurang baik dan belum dapat melayani secara maksimal kebutuhan air pertanian, semesetinya dilakukan pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi
4. Pembangunan pintu air/bendung pengendalian banjir dengan baik.  
Rentannya resiko genangan banjir disebabkan saluran pembuangan air tidak dapat berfungsi secara maksimal dan

masih kurangnya sistem jaringan drainase yang memadai. Strategi pembangunan infrastruktur pengendali banjir dapat meningkatkan lahan pemukiman yang bebas banjir

5. Pembangunan Infrastruktur Pelindung Pantai dan Tebing

Tingginya tingkat abrasi diwilayah pesisir menyebabkan rentannya resiko abrasi pantai. Dengan dibangunnya perkuatan tebing, breakwater, seawall, dan pengaman pantai lainnya dapat melindungi garis pantai dan tebing yang rawan longsor.

6. Pembangunan Embung dan Penampungan Air

Infrastruktur air baku yang ada belum memadai untuk melayani kebutuhan air bersih Kabupaten Bengkalis. Dampak pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air baku dapat menambah jumlah unit air baku dalam kondisi baik dan kebutuhan air bersih dapat terpenuhi.

7. Pelatihan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

Layanan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) pada awalnya dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan pelatihan pelayanan SIPJAKI dapat mempermudah pengguna jasa konstruksi mengakses informasi jasa konstruksi.

8. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum

Pembangunan sistem penyediaan air minum dapat mengatasi infrastruktur system penyediaan air minum yang rendah dan mendukung upaya penyehatan lingkungan.

9. Meningkatkan efektifitas bangunan gedung pemerintah  
Untuk meningkatkan efektifitas kinerja pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis melaksanakan perencanaan, pembangunan gedung pemerintah agar bertambahnya jumlah gedung pemerintah dalam kondisi layak.
  
10. Penyediaan peraturan daerah/peraturan Kepala Daerah tentang rencana tata ruang.  
Penyusunan peraturan daerah/peraturan Kepala Daerah tentang rencana tata ruang berdampak pada kemudahan informasi dan kepastian dalam pelayanan perizinan pemanfaatan ruang.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dengan tujuan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah
2. Terwujudnya penataan dan pembangunan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (Tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yaitu:

1. Tersedianya aksesibilitas infrastruktur antar kawasan, antar daerah dan antar wilayah, dengan indikator sasaran adalah:
  - Panjang Infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik
  - Persentase garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur
  - Jumlah Unit Air Baku dalam kondisi baik
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur bangunan gedung pemerintah, dengan indikator sasaran adalah:
  - Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi layak
3. tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas, dengan indikator sasaran adalah:
  - Persentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik

- Persentase luas kawasan bebas banjir
- Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
- Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih
- Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS 2021-2026**

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA		MISI : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat										
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah	Tersedianya aksesibilitas infrastruktur antar kawasan, antar daerah dan antar wilayah.	Panjang Infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik	432,86 Km	480,08 Km	528,096 Km	576,104 Km	624,113 Km	672,122 Km	720,131 Km	720,131 Km	
			Percentase garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur	26,01%	26,83%	27,65%	29,30%	30,95%	32,59%	34,24%	34,24%	
			Jumlah Unit Air Baku dalam kondisi baik	4 Unit	4 Unit	4 Unit	5 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	
			Percentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik	69,18%	70,04%	71,04%	73,49%	75,77%	75,85%	78,59%	78,59%	
			Percentase luas kawasan bebas banjir	77,10%	78,10%	79,10%	81,10%	83,10%	85,10%	87,10%	87,10%	
	Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berawasan lingkungan	tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas	Percentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	89,67	91,32	93,81	93,81	98,78	100	100	100	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target							Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup	4 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	35,20%	58,03%	60,53%	63,03%	65,53%	68,03%	70,53%	70,53%	
			Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	na	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan RPJMD  
Kabupaten Bengkalis 2021-2026**

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA				
Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter				
Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah kebijakan
2.1. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik.	2.1.1. Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan	2.1.1.1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah.	2.1.1.1.1. Penguatan akselerasi pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.	2.1.1.1.1.1. Sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.
		2.1.1.2. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).	2.1.1.1.2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan.	2.1.1.1.2.1. Melaksanakan sinergitas pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan.
		2.1.1.3. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE).	2.1.1.1.5. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan pemerintahan.	2.1.1.1.5.1. Menyediakan Kebijakan, Tatakelola dan Mengembangkan Layanan Teknologi Informasi dan komunikasi yang terintegrasi.
Misi 3: Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat				
3.1. Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah.	3.1.1. Tersedianya infrastruktur jalan wilayah dalam kondisi baik.	3.1.1.1. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik.	3.1.1.1.1. Penguatan kualitas jaringan jalan dan jembatan antar kawasan dan antar wilayah.	3.1.1.1.1.1. Fasilitasi peningkatan kualitas jalan (jembatan) strategis pada kluster kawasan yang bersumber dari anggaran non APBD.
		3.1.1.2. Panjang Jalan Poros dan Jembatan Pada Wilayah Perbatasan Dalam Kondisi Baik.		3.1.1.1.1.2. Mengembangkan jaringan jalan poros, jembatan dan penataan drainase pada wilayah kecamatan dan perdesaan

			3.1.1.1.2. Penguatan jaringan infrastruktur jalan dan jembatan pada wilayah perbatasan	3.1.1.1.2.1. Mengupayakan pemerataan penyediaan serta fasilitasi infrastruktur jalan dan jembatan pada wilayah LOKPRI (perbatasan)
	3.1.3. Tersedianya layanan infrastruktur pemukiman yang sehat dan aman.	3.1.3.2. Persentase Rumah Tangga (RT) akses air bersih.	3.1.3.1.2. Penguatan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat.	3.1.3.1.2.1. Optimalisasi dan perluasan cakupan pelayanan penyediaan air bersih bagi rumah tangga
3.2. Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan.	3.2.2. Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup.	3.2.2. Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup.	3.2.2.1.1. Penguatan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan.	3.2.2.1.1.2. Memfungsikan dengan baik Pemanfaatan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang.

**Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis 2021-2026**

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA				
Misi 3 : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat				
Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1. Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah.	1. Tersedianya infrastruktur jalan wilayah dalam kondisi baik	1.1 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik.	1.1.1. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan yang baik	1.1.1.1. Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan yang baik
			1.1.2. Peningkatan sistem jaringan irigasi	1.1.2.1. Terlaksananya sistem jaringan irigasi
			1.1.3. Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir	1.1.3.1. Terlaksananya infrastruktur pengendalian banjir
			1.1.3. Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir	1.1.3.1. Terlaksananya infrastruktur pengendalian banjir
			1.1.4. Peningkatan infrastruktur pelindung pantai dan tebing	1.1.4.1. Terlaksananya infrastruktur pelindung pantai dan tebing

			1.1.5 Peningkatan infrastruktur air baku	1.1.5.1. . Terlaksananya infrastruktur air baku
1.Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah.	1. Tersedianya infrastruktur jalan wilayah dalam kondisi baik	2.1 Persentase SIPJAKI yang terlaksana.	2.1.1 Peningkatan laporan SIPJAKI	2.1.1.1 Terlaksananya laporan SIPJAKI
	2. Tersedianya layanan infrastruktur pemukiman yang sehat dan aman	3.1 Persentase Rumah Tangga (RT) akses air bersih.	3.1.1. Peningkatan sistem penyediaan air minum	3.1.1.1. Terlaksananya sistem penyediaan air minum
	3. Meningkatkan kualitas infrastruktur bangunan gedung pemerintah	4.1 Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	4.1.1. Peningkatan bangunan gedung yang layak	4.1.1.1. Terlaksananya bangunan gedung yang layak
2. Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan.	2. Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup.	2.1. Indeks Kualitas tutupan lahan.	2.1.1. Peningkatan peraturan daerah/peraturan Kepala Daerah tentang rencana tata ruang.	2.1.1.1. Terlaksananya peraturan daerah/peraturan Kepala Daerah tentang rencana tata ruang.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perngkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

**Gambar 6.1 Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala sub bidang/kepala sub bagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 direncanakan pada periode renstra tahun 2021-2026, berikut program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu**

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SA TU AN	KO ND ISI EX TH 20	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA						
		U	Bid.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan	1	03	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10			26.026.185.518	25.599.959.010	28.598.041.450	26.350.368.480	26.687.991.330	27.538.276.410										
		1	03	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
		1	03	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pembuatan laporan dalam satu tahun	%		10	244.967.000	350.000.000	410.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000				
		1	03	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam satu tahun																			
		1	03	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayar	Tahun		1	12.319.672.036	11.625.198.850	11.789.724.628	12.043.424.558	12.342.851.508	13.193.136.588										

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bid.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1	03	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																			
		1	03	1	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase barang milik daerah yang terdapat dalam satu tahun	%		100	751.100.000	100	800.000.000	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000				
		1	03	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang		33		33			33						33					
		1	03	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK dalam satu tahun	Orang		20	355.430.000	22	400.000.000	400.000.000	22	400.000.000	22	400.000.000	22	400.000.000	22	400.000.000				



TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SA TU AN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bid.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1	03	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
		1	03	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ke g i a t a n		1	8.216.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000			
		1	03	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam satu tahun	I t e m		31	367.184.100	40	400.000.000	40	400.000.000	40	400.000.000	40	400.000.000	40	400.000.000	40	400.000.000			
		1	03	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang tersedia dalam satu tahun	B o x		1257	19.465.000	1300	20.000.000	1400	25.000.000	1400	25.000.000	150	30.000.000	1500	30.000.000	1500	30.000.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SA TU AN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bkd.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	RP	TA	RG	RP	TA	RG	RP	TA	RG	RP	TA	RG	RP	TA	RG	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1	03	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggantian	Jumlah barang cetakan dan penggantian yang terpenuhi dalam satu tahun	Item		16	84.663.500	20	83.000.000	22	90.000.000	22	90.000.000	22	90.000.000	22	90.000.000	22	90.000.000			
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penerbitan buletin dalam satu tahun	%	80			100			100				100							
		1	03	1	2.06	06		Jumlah langganan surat kabar	Tahun	1	70.950.000	1	71.000.000	1	71.000.000	1	71.000.000	1	71.000.000	1	71.000.000	1	71.000.000				
		1	03	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi dilakukan koordinasi dalam kota dan dinas biasa dalam satu tahun	Kali	485	872.153.000	485	875.000.000	485	875.000.000	485	875.000.000	499	900.000.000	499	900.000.000	499	900.000.000				
		1	03	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah																			

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SA TU AN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bid.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1	03	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	7	7	1.524.216.000	1.473.567.160	1.524.216.000	1.524.216.000	1.524.216.000	1.524.216.000	1.524.216.000	1.524.216.000	1.524.216.000	1.524.216.000	1.524.216.000	1.524.216.000				
		1	03	1	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar	Unit	4	4	2.776.320.000	2.776.320.000	2.776.320.000	2.776.320.000	2.776.320.000	2.776.320.000	2.776.320.000	2.776.320.000	2.776.320.000	2.776.320.000	2.776.320.000	2.776.320.000				
		1	03	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Unit	37	37	195.704.000	195.704.000	195.704.000	195.704.000	195.704.000	195.704.000	195.704.000	195.704.000	195.704.000	195.704.000	195.704.000	195.704.000				
		1	03	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Le m b a r Unit	332 42	332 42	381.268.000 381.268.000	381.268.000 381.268.000	381.268.000 381.268.000	381.268.000 381.268.000	381.268.000 381.268.000	381.268.000 381.268.000	381.268.000 381.268.000	381.268.000 381.268.000	381.268.000 381.268.000	381.268.000 381.268.000	381.268.000 381.268.000	381.268.000 381.268.000	381.268.000 381.268.000			
		1	03	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	42	42																

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SANTUAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bkd.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1	03	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang tertib administrasi	Le m b a r		2000	1.793.600.000	2000	1.836.800.000	2000	1.836.800.000	2000	2000	1.836.800.000	2000	1.836.800.000	2000	1.836.800.000				
								Jumlah honor tenaga administrasi yang dibayarkan dalam satu tahun	Or a n g		85		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87				
								Jumlah website yang tersedia sebagai publikasi SKPD	Ke g i a t a n		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		1	03	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya layanan telepon, air dan listrik dalam satu tahun	%		100	552.342.882	100	565.000.000	609.083.822	646.624.822	646.624.822	646.624.822	646.624.822	646.624.822	646.624.822	646.624.822	646.624.822				

TUJUAN	SASARAN	KODE					INDIKATOR KINERJA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SAJUTAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																							
		U	Bld.U	Prog	Keg	Sub				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026							
											TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET		
											RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga laboratorium yang tersedia dalam satu tahun	Orang		25	1.822.800.000	1.822.800.000	1.822.800.000	1.822.800.000	1.822.800.000	1.822.800.000	1.822.800.000	1.822.800.000	1.822.800.000	1.822.800.000	1.822.800.000	1.822.800.000	1.822.800.000	1.822.800.000	1.822.800.000	1.822.800.000	1.822.800.000					
					2.08	04		Jumlah tenaga workshop yang disediakan dalam satu tahun	Orang		45																						
					2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan																									
					2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas yang mendapat perpanjangan perizinan	%		100	74.000.000	75.000.000	88.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000					

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bld.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1	03	1	2.09	02	<p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>Persentase kendaraan dinas operasional yang dipelihara dalam satu tahun</p>	%	10	1.002.500	10	1.002.500	10	1.002.500	10	1.002.500	10	1.002.500	100	1.002.500	10	1.002.500	10	1.002.500			
									Orang	25	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27				
		1	03	1	2.09	10	<p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Peralatan gedung kantor yang dapat beroperasi dengan baik</p> <p>Persentase pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun</p>	Item	5	809.625.000	11	831.792.000	15	900.000.000	20	924.702.000	25	932.890.000	25	932.890.000	25	932.890.000	25	932.890.000			
									%	10	10	10	10	10	10	10	10	100	10	10	10	10	10				

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SA TU AN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																					
		U	Bid.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026					
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
										12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan permukiman yang berkualitas		1	03	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				31.020.97 4.930	31.288.83 8.790	31.799.07 5.550	32.206.00 5.920	32.618.6 56.070	33.657.8 93.390														
		1	03	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur																						

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SA TU AN	KOD ISI EX TH 20 20	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA						
		U	Bid.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1	03	2	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Tersusunnya dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen		2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	1.000.000,00			
		1	03	2	2.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	Tersusunnya dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen		2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	1.000.000,00			



TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SA TU AN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bkd.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1	03	2	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai.	Tersusunnya dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendalian banjir, lahar, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai	Do ku me n	2	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			
		1	03	2	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WSKewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Do ku me n	1	200.000.000,00	0	0	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1	03	2	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya dengan baik	Do ku me n	1	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00			
		1	03	2	2.01	08	Pembangunan Unit Air Baku	Terbangunnya Unit Air Baku dengan baik	Un it	0	-	3.000.000.000,00	3.506.930.370,00	3.506.930.370,00	3.506.930.370,00	3.506.930.370,00	3.506.930.370,00	3.506.930.370,00	3.506.930.370,00	3.506.930.370,00	3.506.930.370,00	3.506.930.370,00	3.506.930.370,00	3.506.930.370,00			

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA						
		U	Bid.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
		1	03	2	2.01	10	Panjang bangunan perkotaan tebing yang dibangun dengan baik	M		1.500	13.320,90	1500.000,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1500.000,00	44.820.974,930				
		1	03	2	2.01	11	Terbangunnya Pintu Air/Bendungan Pengendali Banjir dengan baik	Unit		0	-	4	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00				
		1	03	2	2.01	17	Panjang Bangunan Breakwater yang dibangun dengan baik	M		0	-	40	7.388,83	7.388,83	8.790,00	40	7.388,83	7.388,83	14.768,656,07	14.768,656,07	14.768,656,07	1500.172,440					
		1	03	2	2.01	18	Panjang Bangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang dibangun dengan baik	M		0	-	10	1.000,00	1.000,00	0.000,00	10	1.000,00	1.000,00	2.039,237,320,00	2.039,237,320,00	2.039,237,320,00	4.000.000,00					
		1	03	2	2.01	23	Unit Air Baku yang direhabilitasi dengan baik	Unit		0	-	1	300.000,00	200.000,00	200.000,00	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	900.000,00					

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bkd.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1	03	2	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi	M		500	3.500.000,00	200	1.000.000,00	200	1.000.000,00	200	1.000.000,00	200	1.000.000,00	200	1.000.000,00	200	1.000.000,00			
		1	03	2	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang direhabilitasi dengan baik	Unit		0	-	0	50.000,00	2	50.000,00	2	50.000,00	2	50.000,00	2	50.000,00	2	150.000,00			
		1	03	2	2.01	27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang direhabilitasi	M		200	1.000.000,00	200	1.000.000,00	200	1.000.000,00	200	1.000.000,00	200	1.000.000,00	200	1.000.000,00	200	5.000.000,00			
		1	03	2	2.01	33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai yang direhabilitasi	M		200	2.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	6.000.000,00			
		1	03	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi	M		200	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	5.000.000,00			

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SA TU AN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bld.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1	03	2	2.02		<p>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota</p> <p>Persentase daerah irigasi dalam kondisi baik</p>																				
		1	03	2	2.02	01	<p>Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa</p> <p>Tersusunnya dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa</p>	Do ku me n			4	400.000.000,00	6	600.000.000,00	6	600.000.000,00	6	600.000.000,00	6	600.000.000,00	6	600.000.000,00	6	2.800.000,00			

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA						
		U	Bkd.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
		1	03	2	2.02	16	Persentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik	%		69,18	7.000,00	71,04	4.000,00	73,49	4.460,23	75,77	4.460,285	1.000,00	78,59	1.000,00	78,59	1.000,00	20.920.473,520				
		1	03	2	2.02	23	Jaringan Irigasi Rawa yang dilaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa dengan baik	Unit		0	-	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	4.000.000,00				
Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan																											
		1	03	3	2.01		Persentase tersedianya sistem penyediaan air minum Kabupaten Bengkalis																				

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bid.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1	03	3	2.01	01	Penyusunan Rencana, kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase Tersedianya Sistem penyediaan Air Minum Kab. Bengkalis	%		100	12.000.000.000	100	13.000.000.000	2.000.000.000	100	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000				
		1	03	3	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen		2	39.384.546.000	37	13.477.718.570									13.477.718.570				
		1	03	3	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum dikawasan Perkotaan	%		100	6.511.184.000	100	3.000.000.000									3.000.000.000				
		1	03	3	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan	Jumlah SR yang terlayani	SR		500	19.549.320.810	500	19.061.643.360	19.549.320.810	19.549.320.810	19.549.320.810	19.549.320.810	19.549.320.810	19.549.320.810	19.549.320.810	19.549.320.810	19.549.320.810				

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SA TU AN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bid.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1	03	3	2.01	09	Pembinaan dan Peningkatan Terhadap Tarif Air Minum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Pe ny ele ng ga ra					5	10.000.000.000	5	10.000.000.000	5	10.000.000.000	5	10.000.000.000	5	10.000.000.000				
		1	03	3	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR yang terlayani	SR				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
		1	03	4	2.01		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah unit SPM yang diperluas	Un it				5	7.000.000.000	5	7.000.000.000	5	7.000.000.000	5	7.000.000.000	5	7.000.000.000	5	7.000.000.000			
		1	03	4	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota																				

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SA TU AN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bid.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1	03	4	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/3R/TPS	%				10	1.000.000	0	10	1.000.000	0	100	1.000.000.000	10	1.000.000	0	10	1.000.000	0	
		1	03	4	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	%				10	1.000.000	0	10	1.000.000	0	100	1.000.000.000	10	1.000.000	0	10	1.000.000	0	
		1	03	4	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terbangunnya TPA/TPST/TPS-3R/TPS di Kab. Bengkalis	%				10	1.000.000	0	10	1.000.000	0	100	1.000.000.000	10	1.000.000	0	10	1.000.000	0	



TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA							
		U	Bkd.U	Prog	Keg					Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026			
											TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
		1	03	4	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terbangunnya Sarana dan Prasarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kab. Bengkalis	%		10	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	100	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
		1	03	4	2.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terbangunnya Sarana dan Prasarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kab. Bengkalis	%		10	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	100	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
		1	03	4	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan	%		10	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	100	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
		1	03	47	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	%		10	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	100	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
		1	03	4	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	%		10	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	100	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SA TU AN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bid.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA RG ET	RP	TA RG ET	RP	TA RG ET	RP	TA RG ET	RP	TAR GET	RP	TA RG ET	RP	TA RG ET	RP	TA RG ET	RP	TA RG ET	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan permukiman yang berkualitas lingkungan	Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas lingkungan	1	3	5	2.01		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9																			
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pembangunan tangki septik skala individual																			
		1	03	5	2.01	06	Pembangunan/Perencanaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terlaksananya Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	Unit	264	1.998.712.659	400	2.815.995.491	400	2.861.916.800	400	2.898.540.533	400	2.935.679.046	400	2.935.679.046	400	2.935.679.046				
		1	03	5	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sosialisasi dan Pemberdayaan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	%																		

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																							
		U	Bkd.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026							
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
		1	03	5	2.01	09	%				10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	100	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	0	0
		1	03	5	2.01	10	%				10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	100	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	0	0
		1	03	5	2.01	11	%				10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	100	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	0	0





TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KODISINISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bid.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1	03	6	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas kawasan bebas banjir																			
		1	03	6	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen		0	-	2	300.000.000,00	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00				
		1	03	6	2,01	02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan	Dokumen		0	-	0	-	200.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-				
		1	03	6	2,01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun yang berfungsi dengan baik	M		3000	3.000.000.000,00	3000	3.000.000.000,00	3000	3.000.000.000,00	3000	3.000.000.000,00	3000	3.000.000.000,00	3000	3.000.000.000,00					

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	KODISYAH	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA						
		U	Bid.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1	03	6	2,01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang direhabilitasi yang berfungsi dengan baik	M		15 00	1.640.177.260,00	12 00	1.388.879.780,00	12 00	1.381.650.100,00	16 00	1.655.637.440,00	170 0	1.730.664.740,00	19 00	1.919.616.980,00	19 00	1.919.616.980,00			
		1	03	6	2,01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun yang berfungsi dengan baik	M		10 00	1.000.000.000,00	10 00	1.000.000.000,00	10 00	1.000.000.000,00	10 00	1.000.000.000,00	100 0	1.000.000.000,00	10 00	1.000.000.000,00	10 00	1.000.000.000,00			
		1	03	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN																				
		1	03	7	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota																				

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SA TU AN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																					
		U	Bkd.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026					
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
										12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
		1	03	7	2	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	%					10 0	1.000.00 0	10 0	1.000.00 0.000	10 0	2.000.0 00.000	100	2.000.0 00.000	10 0	2.000.0 00.000	10 0	2.000.0 00.000	10 0	2.000.0 00.000	2.000. 000.00 0			
		1	03	7	2	01	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	%					10 0	1.000.00 0.000	10 0	1.000.00 0.000	10 0	2.000.0 00.000	100	2.000.0 00.000	10 0	2.000.0 00.000	10 0	2.000.0 00.000	10 0	2.000.0 00.000	2.000. 000.00 0			



TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SA TU AN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bid.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA RG ET	RP	TA RG ET	RP	TA RG ET	RP	TA RG ET	RP	TAR GET	TA RG ET	RP	TA RG ET	RP	TA RG ET	RP	TA RG ET	RP	TA RG ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
								Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur																			
		1	03	7	2.01	3		Persentase Pengendalian Infrastruktur Kawasan Perumahan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	%				100	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000			
								Tersedianya Infrastruktur Kawasan Perumahan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	%																		
		1	03	7	2.01	4		Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Perumahan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					100	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000			
Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwujud yang berkualitas	Tertatanya kawasan perumahan yang berkualitas	1	03	8				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG																			

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																												
		U	Bid.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026												
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET							
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11																												
		1	03	8	2.	01	Terbangunnya sarana dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang layak di Kabupaten Bengkalis	Do																													
		1	03	8	2.	01	Penyelenggaran Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten /Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersedianya Data Bangunan Gedung	10	0	641.033.800	10	0	641.019.000	10	0	800.000.000	10	0	800.000.000	100	800.000.000	10	0	800.000.000	10	0	800.000.000	10	0	800.000.000	10	0	800.000.000	10	0	800.000.000

TUJUAN	SASARAN	KODE								TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA											
		U	Bkd.U	Prog	Keg	Sub	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SA TU AN	KO ND ISI	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026			TA RG ET	RP	TA RG ET	RP	
											TH 20 20	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG					ET
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24									
		1	03	8	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunya Sarana dan Prasarana Bangunan Pemerintah yang Layak di Kab. Bengkalis	Dokumen		40	35.017.180.000	40	85.000.000.000	40	90.000.000.000	40	90.000.000.000	40	90.000.000.000	40	90.000.000.000	40	90.000.000.000	40	90.000.000.000	40	90.000.000.000	90.000.000.000				
		1	03	8	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Bangunan Gedung	Dokumen		24	120.596.000	24	174.032.000	24	150.000.000	24	200.000.000	24	200.000.000	24	200.000.000	24	200.000.000	24	200.000.000	24	200.000.000	200.000.000				
		1	03	8	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Bangunan Gedung	Dokumen		16	390.696.000	16	232.948.000	16	382.350.000	16	382.350.000	16	382.350.000	16	382.350.000	16	382.350.000	16	382.350.000	16	382.350.000	382.350.000				

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bkd.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA ET	RG	RP	TA ET	RG	RP	TA ET	RG	RP	TA ET	RG	RP	TA ET	RG	RP	TA ET	RG	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1	03	8	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah	Unit		19	4.546.830.000	14	2.602.852.500	20	5.000.000.000	15	5.000.000.000	20	5.000.000.000	20	5.000.000.000	23	5.000.000.000			
		1	03	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																				
		1	03	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten /Kota																				
		1	03	9	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten /Kota	Persentase Tersedianya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	%				10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	100	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																						
		U	Bld.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026						
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
		1	03	9	2,01	02	Supervisi Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	%					10	0	500.000.000	10	0	500.000.000	100	500.000.000	10	0	500.000.000	10	0	500.000.000		10	0	500.000.000	
		1	03	9	2,01	03	Terbangunnya Sarana dan Prasarana dan Bangunan dan lingkungan yang Layak	%					10	0	1.000.000.000	10	0	2.000.000.000	100	3.000.000.000	10	0	3.000.000.000	10	0	3.000.000.000		10	0	3.000.000.000	
		1	03	9	2,01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	%					10	0	1.000.000.000	10	0	2.000.000.000	100	3.000.000.000	10	0	3.000.000.000	10	0	3.000.000.000		10	0	3.000.000.000	
		1	03	9	2,01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	%					10	0	500.000.000	10	0	500.000.000	100	500.000.000	10	0	500.000.000	10	0	500.000.000		10	0	500.000.000	
		1	03	9	2,01	06	Monitoring Penataan/Pe meliharaan Bangunan dan Lingkungan	%					10	0	500.000.000	10	0	500.000.000	100	500.000.000	10	0	500.000.000	10	0	500.000.000		10	0	500.000.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SA TU AN	KO ND ISI EX T	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA						
		U	Bid.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah	Tersedia nya infrastruktur jalan wilayah dalam kondisi baik	1	03	10	2.01		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik (km)																			
		1	03	10	2.01	01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Rasio panjang jalan dalam kondisi baik																			
		1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Panjang infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik (km)	Km		48,00,87	1.712,924,444	52,8,09,6	1.727,715,421	57,6,10,4	1.755,889,811	62,4,11,3	1.786,631,241	672,12,2	1.809,523,047	72,0,1,31	1.867,174,836	72,0,1,31	1.867,174,836			
		1	03	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Km		48,00,87	303,647,239	52,8,09,6	306,269,211	57,6,10,4	311,263,637	62,4,11,3	316,713,119	672,12,2	320,771,111	72,0,1,31	330,990,947	72,0,1,31	330,990,947			
		1	03	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	Km		48,00,87	119,024,962,176	52,8,09,6	120,052,734,059	57,6,10,4	122,010,471,080	62,4,11,3	124,146,582,567	672,12,2	125,737,251,899	72,0,1,31	129,743,267,488	72,0,1,31	129,743,267,488			

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SA TU AN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bid.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Km																			
		1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Km			160	26.642.014.045	160	26.872.065.897	170	27.310.276.977	180	27.788.414.598	190	28.144.462.891	200	29.041.151.465	200	29.041.151.465			
		1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Km			480	2.566.283.974	528	2.588.443.650	576	2.630.654.200	624	2.676.710.662	672	2.711.006.907	720	2.797.301.163	720	2.797.301.163			
		1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Unit			33	1.329.931.985	33	1.341.415.851	34	1.363.290.733	35	1.387.158.693	36	1.404.932.124	37	1.449.693.561	37	1.449.693.561			
Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah	Tersedianya infrastruktur jalan wilayah dalam kondisi baik	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI																				
		1	03	11	2.01		Penyediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten / Kota				578.445.000		262	2.000.000.000	262	2.000.000.000	262	2.000.000.000	262	2.000.000.000	262	2.000.000.000	262	2.000.000.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																					
		U	Bid.U	Prog	Keg					Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026					
											TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
		1	03	11	2.01	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan	Perangkat Pendukung Untuk Layanan Jasa Konstruksi	Tahun				1	400.000.000	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000						
		1	03	11	2.01	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Laporan SIPJAKI	Tahun		1	313.625.000	1	400.000.000	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000						
		1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)																								
		1	03	11	2.03	02	Dukungan /Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Laporan IUJK	Do ku me n		200	264.820.000	200	400.000.000	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000						



TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SA TU AN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bid.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1	03	11	02.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi																				
		1	03	11	02.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil yang mempunyai keahlian dibidang Konstruksi	Oran g		30	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000			
		1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Tenaga Terampil Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil dibidang Konstruksi	Oran g		30	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000			
Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan	Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Penetapan Rencana detail tata ruang																			
		1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang			732.415.885	53	738.740.240	53	750.000.000	53	762.000.000	53	770.000.000	26	794.650.000	26	794.650.000	5			

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bid.U	Prog	Keg			Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
									TA RG ET	RP	TA RG ET	RP	TA RG ET	RP	TA RG ET	RP	TA RG ET	RP	TAR GET	RP	TA RG ET	RP	TA RG ET	RP	TA RG ET	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
		1	03	12	01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTR	Do ku me n		1	146.483.177	1	147.748.048	1	150.000.000	1	152.000.000	1	154.000.000	5	158.930.000	5	158.930.000		
		1	03	12	02	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran masyarakat dalam Penataan Ruang																		
		1	03	12	02	3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Pelatihan Tata Ruang	Kc gia ta n		1	146.483.177	1	147.748.048	1	150.000.000	1	152.000.000	1	154.000.000	5	158.930.000	5	158.930.000		
		1	03	12	03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang																		

TUJUAN	SASARAN	KODE						INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SA TU AN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																			
		U	Bid.U	Prog	Keg	Sub	TAHUN 2021				TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026							
							TA				RG	RP	TA	RG	RP	TA	RG	RP	TA	RG	RP	TAR	GET	RP	TA	RG	RP	TA	RG	RP
							ET				ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	KKPR/PKKPR	Ke g a t a n		1	146.483.177	1	147.748.048	1	150.000.000	1	152.000.000	1	154.000.000	5	158.930.000	5	158.930.000						
		1	03	12	03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Sistem Informasi	%		20	146.483.177	20	147.748.048	20	150.000.000	20	152.000.000	20	154.000.000	10	158.930.000	10	158.930.000						
		1	03	12	04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Data dan Dokumen perencanaan/ pemanfaatan tata ruang																						
		1	03	12	04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang bersama Provinsi dan Pusat	Koordinasi		30	146.483.177	30	147.748.048	30	150.000.000	30	154.000.000	30	154.000.000	15	158.930.000	15	158.930.000						
		1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)																							

TUJUAN	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	KODISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
		U	Bhd.U	Prog	Keg				Sub	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
										TA	RG	RP	TA	RG	RP	TA	RG	RP	TA	RG	RP	TAR	GET	TA	RG	RP	TA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		1	4	5	2,01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																				
		1	4	5	2,01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Humian	Terbangunnya Prasarana dan Fasilitas Umum yang Layak di Kab. Bengkalis	Paket		57	12.642.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	12.642.260.000		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis. Target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis 2021-2026**

No	INDIKATOR SASARAN	KINERJA AWAL (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Panjang Infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik	432,861	480,087	528,096	576,104	624,113	672,122	720,131
2	Persentase garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur	69,18%	70,04%	71,04%	73,49%	75,77%	75,85%	78,59%
3	Jumlah Unit Air Baku dalam kondisi baik	4 Unit	4 Unit	4 Unit	5 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit
4	Persentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik	69,18%	70,04%	71,04%	73,49%	75,77%	75,85%	78,59%
5	Persentase luas kawasan bebas banjir	77,10%	78,10%	79,10%	81,10%	83,10%	85,10%	87,10%
6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	89,67	91,32	93,81	93,81	98,78	100	100
7	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	35,20%	58,03%	60,53%	63,03%	65,53%	68,03%	70,53%
8	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	na	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Indikator kinerja yang disajikan merupakan alat ukur dalam penilaian capaian yang dikehendaki dari implementasi program perangkat daerah. Dalam tabel 7.1. tersebut, terdapat empat indikator sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Kesimpulan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis 2021-2026 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis guna mencapai sasaran-sasaran Dinas.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis 2021-2026 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis (RPJMD) 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait.

Dokumen Renstra yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan tahun 2026 telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis 2021-2026 secara konsisten

dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan agar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang selaras dengan visi “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”.

## **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh Aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,



pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
6. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.

Bengkalis, 21 April 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BENGKALIS



ARDIAN SYAH, ST, MT  
Pembina (IV/a)

NIP. 19860625 201001 1 012